

---

# PENGAJIAN KEGIATAN STRATEGIS KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA DI DKI JAKARTA

Miftah Arifin

*Ahli Pemikiran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
dan Sedang Menempuh S-3 di UIN Jakarta*

## ABSTRACT

To reach social stability in this country, the government since early through religion department have performed a reconciliation of people believe in program. But social fact shows the existence of riot and distortion which have nuance to SARA happened in the society. Hence becoming important in order to be known what reconciliation program which have been executed during these decades have been effective or not. This research is expected to give information about effectiveness of reconciliation activity which have been executed by government specially in DKI Jakarta.

**Kata Kunci:** SARA, kerusuhan sosial, kerukunan umat beragama, dan pemerintah

Agama merupakan salah satu sistem acuan nilai (*system of referenced value*) yang memiliki daya pengikat sekaligus daya pengurai terhadap umatnya untuk bersama-sama hidup berdampingan dengan umat yang lain. Kehidupan bermasyarakat bisa menjadi lebih harmonis karena determinasi agama, namun sebaliknya tata hidup masyarakat juga bisa berantakan akibat pertikaian agama. Maka sebetulnya agama memiliki peran strategis dalam keseluruhan sistem tindakan yang mengarahkan dan menentukan pola hidup dan kehidupan umatnya. Fenomena ini dapat kita saksikan bukan hanya di DKI Jakarta melainkan juga wilayah lain di Indonesia yang berpenduduk multi agama dan etnis secara jelas dan nyata. Uraian tentang agama sebagai sumber acuan nilai yang menentukan dalam sistem tindakan manusia dikemukakan dalam Talcott Parson, "*Religion and the Problem of Meaning*" dalam

Roland Robertson (ed.) *Sociology of Religion* (1969: 55-60).

Pemerintah sesungguhnya telah membuat bermacam program yang bertujuan untuk mencegah agar kerusuhan dan sejenisnya tidak terjadi. Bahkan sebelum itu pemerintah telah mengantisipasi dengan membuat kebijakan yang mengatur hubungan warganya yang dikenal dengan program tri kerukunan umat beragama, mengeluarkan keputusan Menteri Agama yang juga mengatur hubungan antar umat beragama, serta membuat program kaji tindak kerukunan umat beragama.

Akan tetapi, meskipun pemerintah telah berupaya berusaha secara maksimal, akan tetapi potensi untuk rusuh tetap saja demikian besar dan dapat muncul ke permukaan kapan saja dan di mana saja. Tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa program-program yang telah direncanakan secara matang dan sistematis ter-

---

sebut gagal, sebab mungkin saja faktor pemicu terjadinya konflik bukanlah faktor agama melainkan faktor yang lain seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan politik, ataupun ketidakadilan ekonomi, dan lain sebagainya.

Persoalan agama memang menjadi wacana menarik untuk diperbincangkan. Agama sering kali menjadi kambing hitam pemicu konflik dan disintegrasi antar umat beragama di Indonesia. Kondisi ini menjadi lampu kuning untuk segera mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebab di beberapa tempat di negeri ini, beberapa kali terjadi gangguan terhadap kerukunan hidup antar umat beragama, yang hal ini disebabkan mungkin saja persoalan murni agama atau disebabkan oleh faktor yang lain.

Menajamnya konflik ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal berupa kondisi lingkungan sosial yang masih memprihatinkan. Akibatnya mudah menciptakan peluang yang memungkinkan terjadinya konflik antar umat beragama. Satu hal yang logis, bahwa ketegangan yang terjadi selalu melibatkan umat Islam. Ini didukung oleh kenyataan demografis bahwa umat Islam menduduki jumlah mayoritas, sehingga umat Islam adalah pihak yang paling banyak (tidak mutlak) bertanggung jawab atas konflik dan disharmoni yang terjadi.

Kerusuhan yang terjadi baik di Jakarta, Ambon, Aceh, Jawa Timur, Poso dan sebagainya belum tentu disebabkan oleh faktor agama, dampaknya tetap saja menggoreskan luka mendalam di tubuh bangsa ini. Bangsa Indonesia yang mengatakan dirinya adalah bangsa yang santun dan beradab seolah-olah kehilangan momentum dan jati diri. Kerugian yang ditimbulkan bukan saja bersifat material, hancurnya tempat-tempat ibadah, fasilitas umum, rumah penduduk dan sebagainya, tetapi yang paling penting adalah terkikisnya rasa aman sebagian anggota masyarakat.

Melihat persoalan ini, tidak bisa secara sederhana mengaitkan begitu saja dengan agama saja, melainkan lebih tepat apabila dilihat secara kasuistis, artinya berbagai konflik yang terjadi harus dilihat dari tataran praktis. Hal ini disebabkan pada beberapa kasus, dimensi agama --

sebagaimana faktor lain-- dipersepsikan sebagai sarana untuk melakukan mobilitas emosi massa, guna melawan suatu struktur tertentu dalam masyarakat.

Dalam konteks ini sering ditemukan adanya *escape goating mechanism* (mencari kambing hitam). Contohnya adalah tatkala masyarakat menghadapi masalah kesenjangan sosial, politik dan ekonomi, hilangnya sektor-sektor tradisional akibat bermunculannya kekuatan ekonomi di sektor modern atau berkaitan dengan masalah moralitas dan etika masyarakat dan bahkan dalam banyak hal dapat terkait dengan kriminalitas yaitu perilaku kriminal terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Maka masyarakat secara sangat bergairah memberikan *over reaction* (reaksi berlebihan) berupa tindakan kolektif misalnya dengan membakar sentra-sentra ekonomi, tempat ibadah, fasilitas umum dan sebagainya.

Untuk dapat kembali kepada kehidupan yang serasi antar umat beragama, harus dengan memanfaatkan hak kebebasan beragama dengan penuh tanggung jawab untuk menghormati hak kebebasan beragama umat yang lain. Untuk mencapai kerukunan itu tidak sekedar berhenti dalam tataran penajaman ajaran agama, lebih jauh harus disertai langkah kongkret untuk menutup peluang terjadinya kerusuhan. Dengan demikian tidak dapat sekedar mengandalkan wadah kerukunan yang sudah terbentuk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan tingkat kehidupan sosial yang dapat dinikmati oleh kalangan umat beragama terutama kalangan umat Islam yang sebagian besar masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Dalam banyak kasus, berbagai ketegangan yang terjadi di masyarakat sesungguhnya bermula dari keengganan sementara pihak untuk mematuhi aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak syak lagi, aksi menentang aturan main tersebut akan disambut dengan reaksi. Aksi dan reaksi inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan dan konflik di berbagai tempat.

Di samping itu gangguan terhadap keru-

kunan beragama selama ini lebih disebabkan oleh kepentingan politik, pertentangan-pertentangan muncul karena politik nebeng kepada agama, dan kemudian politik mempergunakan simbol-simbol agama. Sedangkan tujuan akhir dari politik adalah *power sharing*, dalam pengertian bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Artinya agama menjadi rusak karena kepentingan politik yang bersifat sesaat. Gangguan terhadap kerukunan beragama bukan munculnya karena kesadaran komunitas. Sebab apabila orang semakin sadar sebagai bagian dari umat Islam atau umat Katolik, maka ia pun semakin sadar kepada aturan main yang telah disepakati yang berlaku dalam hubungan dengan komunitas lain. Hal itu sekaligus berarti, kalau kesadaran komunitas keagamaan tinggi, maka kerukunan umat beragama pun akan lebih terjamin.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan boleh jadi ia merupakan negara paling pluralis di bumi ini. Dengan ratusan suku dan bahasa di dalamnya, bangsa ini menjadi bangsa yang menyimpan potensi besar untuk menyulut konflik dan disintegrasi antar warganya. Tetapi terlepas apakah penyebab dari disharmoni itu adalah agama atau faktor lain, ia harus segera diatasi. Ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab bersama sebagai bangsa

Maka, menjadi penting untuk mengkaji ulang politik kerukunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjalin kerukunan hidup umat beragama. Program kerukunan yang selama ini telah dijalankan seolah-olah tidak memiliki arti signifikan dan kurang berhasil dalam mengatasi masalah kerukunan umat beragama. Pengkajian ulang ini penting untuk mencari alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan program kerukunan yang telah ada, atau membuat format baru yang lebih fleksibel dan jitu setelah dilakukan upaya-upaya evaluasi, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Kajian ini akan memfokuskan kepada persoalan-persoalan, bagaimana pola pembinaan kerukunan di wilayah DKI Jakarta, serta

faktor pendukung dan penghambatnya. Kasus dan konflik keagamaan yang pernah terjadi, apa akar penyebabnya, bagaimana langkah penyelesaiannya serta dampak yang ditimbulkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan program kerukunan antar umat beragama, agar berlangsung secara lebih efektif dan efisien

## METODOLOGI

### Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pelaksanaan program kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Pemda DKI dalam hal ini Kanwil Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta.

### Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam program pembinaan kerukunan umat beragama yang terdiri atas bagian Penerangan dan Humas Kanwil Departemen Agama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, serta masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan yang dimaksud. Mereka ini disebut juga dengan sampel dalam penelitian ini. Jadi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, artinya mengambil orang-orang tertentu untuk dijadikan informan penelitian berdasarkan kualifikasi tertentu.

### Pengumpulan Data

Untuk mencari data secara akurat maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah *pertama*; pedoman wawancara digunakan untuk data kualitatif yang berkaitan dengan operasi-operasionalisasi, persepsi, kelebihan dan kekurangan program pembinaan kerukunan umat beragama yang telah dijalankan, *kedua*; pencatatan dokumen yang diperlukan baik melalui media tulis maupun elektronika.

### Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan *reflectif thinking* (berfikir reflektif) dari John Dewey

(Kasiram, 1984) yaitu memadukan cara berfikir deduksi dan induksi.

## HASIL PENELITIAN

### Dinamika kehidupan keberagaman

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2000 mencapai 8.376.712 jiwa dengan komposisi pemeluk agama Islam menempati jumlah terbanyak dengan 77,87%, dan jumlah pemeluk agama Hindu paling sedikit yakni 1,25 %. Sementara data-data tentang tempat ibadah semua berjumlah 9.547 buah dengan rincian masjid berjumlah 2.529 buah, mushola 5.316 buah, gereja berjumlah 1.333 buah, dan pura/kuil berjumlah 212 buah. Kesemuanya tersebar di lima wilayah kotamadya DKI Jakarta.

Sebuah kelompok masyarakat senantiasa memiliki elite yang memiliki pengaruh dalam kelompok tersebut. Elite ini juga disebut dengan tokoh kunci (*key people*). Demikian juga halnya dalam masyarakat agamis memiliki elite agama/tokoh agama yang berpengaruh, dan memiliki arti penting khususnya dalam kegiatan ritual keagamaan. Mereka ini (elite agama) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pelindung, dan pengayom terhadap umatnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kanwil Dep. Agama, pada tahun 2000 tokoh agama yang tercatat dari masing-masing agama berjumlah sekitar 10.694. Tokoh agama Islam berjumlah sekitar 6.022 orang, disusul dari agama Kristen berjumlah 4.477 orang.

Untuk mendukung aktifitas keberagaman, masing-masing agama memiliki organisasi sosial keagamaan. Di DKI Jakarta terdapat ormas Islam dengan jumlah 299 buah, Majelis Ta'lim 5.422 buah, Remaja Masjid 2.711 buah, dan Yayasan Islam berjumlah 938 buah. Sementara agama Kristen Protestan memiliki sinode dengan jumlah 91 buah, dan yayasan sejumlah 253 buah, Agama Katolik terdapat ormas berjumlah 42 buah dan yayasan berjumlah 67 buah. Agama Hindu mempunyai lembaga sosial dengan jumlah 84 buah, sementara agama Budha memiliki lembaga umat dengan jumlah 13 buah dan yayasan sebanyak 96 buah.

Sebagai salah satu kota metropolitan, Jakarta memiliki aktifitas kehidupan yang sangat padat. Kehidupan agama kalau diperhatikan memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan bukan hanya dari segi kualitas namun juga dari segi kuantitas. Kesadaran agama masyarakat semakin tinggi, yang hal ini tentu saja merupakan hal yang positif dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tradisi menuntut dan memperdalam keilmuan agama, semakin disadari sebagai tanggung jawab semua orang khususnya orang tua terhadap anak-anaknya. Maka mewajibkan anak untuk sekolah di TPA misalnya sangat marak belakangan ini. Di bulan Ramadhan setiap tahunnya, sekolah-sekolah mengadakan pondok pesantren kilat, sebagai nilai tambah untuk peningkatan kualitas anak didik.

Hal lain yang dapat dilihat antara lain adalah banyaknya tempat-tempat ibadah yang berdiri, berdirinya berbagai pondok pesantren dan panti-panti asuhan, berkembangnya pengajian-pengajian baik melalui majelis-majelis taklim, atau melalui media yang lain seperti tulisan (selebaran) radio, televisi, internet, maupun selular.

Kehidupan keagamaan masyarakat metropolitan ini semakin nampak dinamis dengan semakin maraknya acara-acara perayaan hari-hari besar agama, yang hal ini dapat diakses secara nasional. Sebab biasanya acara-acara perayaan hari-hari besar agama ini disampaikan melalui media elektronika dan disiarkan secara live. Perayaan ini tidak hanya monopoli milik umat Islam, akan tetapi agama-agama yang lain juga mengadakan hal yang serupa. Hal ini tentu saja, merupakan fenomena yang menggembirakan semua pihak yang mencerminkan kesadaran terhadap ajaran agamanya masing-masing.

Adanya komunikasi dan hubungan antar penganut agama memungkinkan terjadinya perpindahan agama. Perpindahan agama ini sering terjadi terutama karena faktor keluarga seperti melalui hubungan perkawinan, atau karena faktor pribadi, artinya seseorang secara sadar pindah dari agamanya yang lama ke agama yang

baru, yang dianggapnya lebih baik.

Dari wawancara dengan informan dan data yang ada di Kanwil Depag DKI Jakarta, terdapat perpindahan agama (yang tercatat) khususnya dari agama non Islam beralih ke agama Islam. Sejak tahun 1998 misalnya hingga tahun 2001 terjadi perpindahan dari agama Katholik sebanyak 10 orang, dari agama Kristen Protestan sebanyak 18 orang, dari agama Budha sebanyak 7 orang dan agama Hindu sebanyak 2 orang. Sedangkan perpindahan dari agama ke agama yang lain tidak terdapat informasi yang jelas dari data yang diperoleh.

#### Permasalahan kerukunan

Menyandang kota dengan penduduk terpadat dan multi etnik di Indonesia, Jakarta memiliki potensi yang besar akan terjadinya konflik, dalam berbagai hal. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan terkait dengan permasalahan kerukunan beragama, misalnya Kerusakan Sosial di Kecamatan Matraman (Studi Kasus di Palmeriem) oleh Abdul Aziz tahun 2000, atau Orang Makasar di Bogor dan Jakarta (Studi Kasus tentang Hubungan Antar Etnik dan Paham Keagamaan oleh Adlin Sila Muhamad tahun 2000, bahwa peristiwa konflik yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya faktor politik, ekonomi, agama, etnik, tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, dan antar kampung, rebutan lahan pak ogah (polisi tidur), rebutan lahan parkir dan sebagainya. Kasus-kasus yang terjadi dapat diidentifikasi dengan istilah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)

Contoh konflik yang terjadi dan melibatkan masa adalah "Tragedi Ketapang", Jakarta. Tragedi ini dipicu oleh perkelahian sekelompok anak muda yang saling lempar. Ketika saling lempar itulah, batu mengenai sebuah mesjid. Dari situlah emosi masa menggumpal, lalu masa membalas dengan merusak dan membakar sejumlah gereja. Di sini terlihat dengan jelas betapa agama adalah wilayah yang sangat sensitif. Agama bisa menjadi faktor integrasi tetapi sekaligus juga mengandung potensi disintegrasi (Media Indo-

nesia, tanggal 24 Nopember 1998, h. 1).

Tragedi Ketapang ini masih meninggalkan bekas luka yang dalam bagi suku tertentu yang juga pada umumnya menganut agama tertentu. Kerugian material pun tak terhindarkan. Menurut laporan Kompas, kerusuhan Ketapang itu melibatkan ribuan masa dan telah mengakibatkan rusak dan terbakarnya 10 gereja, dua sekolah, satu hotel, 16 kendaraan roda empat, tiga sepeda motor, dan belasan bangunan lainnya, bahkan dalam kerusuhan ini enam jiwa manusia turut pula melayang (Kompas, tanggal 23 Nopember 1998, h. 1)

Bukan hanya tragedi ketapang yang meninggalkan luka yang mendalam, kasus semisal pemboman masjid Istiqlal, pemboman Gereja Petra, Pembakaran Panti Asuhan Doulos, tawuran antar pelajar dan tawuran antar kampung yang terjadi di kawasan Matraman misalnya dan lain sebagainya. Kasus tawuran yang terjadi di Matraman Jakarta Timur misalnya, yang menjadi pemicu adalah karena tidak adanya pengakuan superioritas anak-anak Berland oleh anak-anak muda kelurahan Palmeriam dan Kayuranis. Keadaan ini ternyata dapat dengan mudah memicu terjadinya konflik dan perkelahian.

Berbagai masalah konflik sosial yang timbul di masyarakat tidak bisa dipukul rata disebabkan oleh semata-mata faktor agama. Dalam banyak hal, agama tidak menjadi faktor determinan yang menyebabkan konflik sosial tersebut muncul. Faktor pemicu utama sesungguhnya adalah bukan faktor agama melainkan faktor-faktor yang lain seperti faktor ekonomi, politik, atau pun sosial budaya.

Ada beberapa faktor pemicu konflik dan pengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di DKI Jakarta yang apabila salah satu meledak akan membuka terjadinya peluang benturan antar pemeluk agama, antara faktor politik tingkat atas, faktor ekonomi seperti rebutan lahan parkir, lahan pak Ogah, faktor budaya Barat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, pendirian rumah ibadah yang tidak memenuhi ketentuan hukum, bantuan sosial yang terselubung, serta perayaan tradisi agama

tanpa memperhatikan perasaan penganut agama lain.

Terkait dengan faktor agama ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik antara lain pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, dan penodaan terhadap agama. Akan tetapi, dari sekian banyak faktor tersebut, faktor yang dominan adalah faktor politik dan ekonomi, karena dua hal ini bersinggungan dengan segala aspek kehidupan dan lapisan masyarakat dan berkaitan dengan hajat orang banyak.

Konflik dan permasalahan kerukunan tidak pernah memberikan keuntungan terhadap masyarakat banyak. Ia senantiasa memberikan kerugian baik moral maupun material, dan bahkan menyisakan luka batin yang mendalam terutama terhadap orang-orang yang secara langsung terlibat dan merasa kehilangan orang-orang yang dicintai. Bagaimana tidak, misalnya saja tragedi ketapang menurut laporan Kompas, kerusuhan Ketapang itu melibatkan ribuan masa dan telah mengakibatkan rusak dan terbakarnya 10 gereja, dua sekolah, satu hotel, 16 kendaraan roda empat, tiga sepeda motor, dan belasan bangunan lainnya, bahkan dalam kerusuhan ini enam jiwa manusia turut pula melayang. Sudah bisa dibayangkan berapa kerugian material yang diderita, serta bagaimana luka batin terhadap mereka yang mengalami peristiwa itu secara langsung.

Korban dan dampak dari pertikaian itu, bukan hanya mengenai orang tetapi juga infra struktur yang ada, hancurnya fasilitas sosial dan pendidikan, dan sebagainya. Ketika hal ini sering terjadi maka kerugian terbesar yang diderita adalah hilangnya rasa aman di antara warga masyarakat. Masyarakat merasa was-was dan takut apabila kerusuhan itu terjadi dan melanda kembali, orang lain akan ketakutan untuk melintasi daerah yang sering mengalami konflik. Hal ini tentu saja mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Seperangkat peraturan yang dibuat bertujuan mengantisipasi munculnya konflik-konflik secara minimal. Misalnya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/

BER/MDN-MAG/1969, tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan tugas aparaturnya pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Dalam SKB tersebut diatur misalnya bagaimana sebuah tempat ibadah boleh didirikan, berapa jumlah minimal penganut agama tertentu sehingga berhak memiliki tempat ibadah, dan sebagainya. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang penyiaran agama, dengan tujuan memberikan rambu-rambu tata cara penyiaran agama, bagaimana boleh dilakukan, di mana, kepada siapa dan sebagainya agar penyiaran agama itu tidak mengganggu kerukunan dan berlangsung dengan baik.

Untuk menghindari dan mencegah kasus-kasus penodaan agama, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yakni Undang-Undang No. 1/PNPS/1956 jo UU No. 5 tahun 1969. Dalam undang-undang tersebut antara lain dinyatakan bahwa: "Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara menyelidikinya. SK Menteri Agama No. 77/1978 tentang Bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa berbagai ikhtiar dan usaha yang dilakukan pemerintah sampai sekarang belum mencapai hasil yang diharapkan. Mungkinkah hal ini merupakan refleksi dari keengganan pemeluk agama untuk dicampuri urusan dalam negerinya oleh pemerintah yang memang memiliki tingkat politisasi yang sangat tinggi.

Adapun langkah-langkah cepat untuk menentramkan warga biasanya diambil langkah dengan mengumpulkan serua tokoh agama yang terlibat dalam masalah tersebut pada satu bangku untuk melakukan musyawarah dan berembuk mencari solusi bersama. Mereka pun dimintai agar menentramkan umatnya agar menahan diri dan tidak terpancing emosinya untuk melakukan hal yang lebih buruk. Di saat yang bersamaan, para tenaga penyuluh agama yang dimiliki oleh Departemen Agama diter-

junkan ke lokasi untuk ikut memberikan penjelasan kepada warga. Jumlah tenaga penyuluh yang diterjunkan ke wilayah konflik ini tergantung kepada kebutuhan (saat ini Departemen Agama DKI Jakarta memiliki kurang lebih 1777 tenaga penyuluh agama). Hal ini sudah diterapkan misalnya kasus tawuran di Matraman, pembakaran tempat ibadah di Cakung, dan sebagainya.

Upaya mendamaikan warga dengan cara instan seperti ini, meskipun tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, akan tetapi cukup efektif untuk meredam suasana untuk sementara waktu. Oleh karena itu maka cara-cara seperti ini selalu dan terus dilakukan dengan terus mengusahakan penyelesaian yang komprehensif dan secara optimal, dengan melibatkan semua unsur atau pihak yang terkait dan bertanggung jawab.

### **Pembinaan kerukunan hidup umat beragama**

Pada umumnya program pembinaan kerukunan hidup umat beragama yang dilaksanakan mengacu kepada program tri kerukunan hidup beragama, yaitu kerukunan inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama untuk membina kerukunan hidup beragama antara lain adalah musyawarah tokoh intern umat beragama, musyawarah tokoh antar umat beragama, musyawarah tokoh umat beragama dengan pemerintah, pembuatan dan penyebaran selebaran-selebaran, membina dan mengoptimalkan peran Penyuluh Agama, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga dakwah, dan membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Umat Beragama.

Tidak semua program yang direncanakan berjalan dengan mudah sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sekali kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang timbul. Hambatan-hambatan ini ada kalanya bersifat internal (berasal dari pelaksana kegiatan) ataupun bersifat eksternal (berasal dari masyarakat).

Atau ada juga kendala yang bersifat teknis, yang semestinya kendala semacam itu dapat teratasi dengan mudah.

Secara umum hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka program kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia yang tersedia dalam merealisasikan program ini masih sangat kurang.
- b. Kurangnya koordinasi antar lembaga atau instansi pemerintah.
- c. Lemahnya dukungan finansial dari pemerintah.
- d. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.
- e. Lemahnya kesadaran masyarakat tentang keputusan menteri agama (KMA), yang mengatur hubungan antar umat beragama dalam menjalankan aktifitas kerberagamaannya.

Dari berbagai sumber dan informan yang ada, diperoleh data bahwa sebagian besar menanggapi program kerukunan yang dijalankan secara positif, akan tetapi mereka memberikan sejumlah catatan. Rata-rata mereka menyambut baik program kerukunan ini terutama menyangkut pengadaan tenaga penyuluh agama dan tindak lanjutnya kemudian. Sebab dengan adanya tenaga penyuluh agama ini sangat membantu pemerintah dalam memberikan penerangan, informasi kepada masyarakat tentang khususnya yang berkaitan dengan kerukunan hdiup bermasyarakat, beragama dan pembangunan.

Masyarakat sendiri (peserta pengajian di majelis-majelis taklimi) menyambut dengan baik dengan adanya tenaga penyuluh agama di lingkungannya. Adanya tenaga penyuluh agama ini memberikan sumbangan positif dalam memperoleh pengetahuan agama. Masyarakat tidak perlu capek-capek untuk mencari nara sumber yang terkadang "susah", namun cukup mengandalkan tenaga penyuluh agama di daerahnya untuk dijadikan nara sumber tetap untuk membimbing mereka memahami secara lebih ajaran agamanya. Maka sudah semestinya agar tenaga penyuluh agama ini tetap dipertahankan dan

kalau bisa lebih ditingkatkan baik mengenai kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh agama, supaya dapat mencapai wilayah yang lebih luas.

Ketika terdapat keributan di masyarakat misalnya tawuran antar warga, pembakaran tempat-tempat ibadah, pemerintah sering menggunakan tenaga penyuluh agama ini untuk diterjunkan ke tempat kejadian, memberikan penerangan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta ikut serta memadamkan suasana yang sedang memanas. Oleh karena itu, ke depan, pengadaan tenaga penyuluh agama ini layak untuk ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas misalnya penunjukkan seseorang untuk menjadi tenaga penyuluh harus memperhatikan kualitas sumber daya yang dimilikinya serta mengetahui betul daerah yang akan menjadi tempat tugasnya, sehingga mereka -tenaga penyuluh agama- tidak perlu "belajar" mengenal situasi, dan kondisi masyarakat dari awal yang hanya akan membuang-buang waktu. Lebih jauh sudah selayaknya apabila diperlukan dukungan finansial yang mencukupi untuk memberikan pesangon terhadap para tenaga penyuluh agama ini, paling tidak memenuhi standar untuk hidup. dukungan dana juga diperlukan untuk melakukan up grading, peningkatan profesionalisme sumber daya penyuluh agama.

Sedangkan untuk program lain misalnya musyawarah baik intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah, hendaknya dibentuk format yang lebih fokus sehingga arah dan tujuan dari kegiatan dapat dilihat secara jelas, dan spesifik. Dengan demikian evaluasi dapat dilakukan untuk mencari kekurangan-kekurangan yang ada dalam mencari format terbaik, sehingga kegiatan yang dilakukan itu baik 3 kali dalam satu tahun atau 2 kali dalam satu tahun dan menghabiskan dana yang tidak sedikit memberikan makna positif dalam upaya peningkatan program kerukunan umat beragama.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, aparat pemerintah, dan pemerintah daerah itu sendiri. Sebab selama ini, pelaksanaan

kegiatan ini berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada kerja sama yang terjalin terutama antar instansi pemerintah serta antar lembaga dakwah yang banyak tersebar di mana-mana.

Bahwasanya program kerukunan umat beragama ini sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab lembaga dakwah saja, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Oleh karena pelaksana dari kegiatan ini semestinya tidak kepada pemerintah dan lembaga dakwah saja, namun pihak yang memiliki kepentingan seperti BUMN, perusahaan-perusahaan swasta lainnya, harus bisa menciptakan suasana yang damai dan bersahabat. Dengan dukungan dana yang berlimpah mereka ini bisa membentuk sebuah badan yang mengurus masalah ini khususnya di lingkungan perusahaan, dan di masyarakat tempat tinggal para pekerjanya pada umumnya.

Oleh karena itu, maka sudah semestinya program ini dilaksanakan secara kontinyu dan simultan, tidak serta merta dan ketika diperlukan. Kesan yang ada adalah departemen yang mengurus masalah kerukunan dianggap sebagai keranjang sampah, yang hanya dilihat dan disertai tanggung jawab ketika diperlukan. Ketika kerusuhan dan tawuran terjadi misalnya, orang kemudian melimpahkan persoalan ini kepada departemen agama. Padahal belum tentu persoalan yang terjadi disebabkan oleh faktor agama. Mungkin saja hal itu timbul karena persoalan ekonomi atau politik. Maka sudah semestinya pendekatan secara ekonomi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut. Dalam hal ini agama adalah sebagai faktor pendukung agar upaya penyelesaian itu lebih cepat tercapai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Saran

Dari uraian tentang persoalan kerukunan umat beragama khususnya di wilayah DKI Jakarta, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Konflik yang melanda di beberapa tempat dan mengancam integritas nasional berkaitan bukan hanya dengan faktor agama semata,

akan tetapi berhubungan dengan banyak faktor lainnya seperti kondisi sosial, dan budaya serta terutama distribusi sumber daya ekonomi, dan akses politik yang tidak adil dan merata.

2. Terkait dengan faktor agama ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik antara lain *pertama*: pendirian tempat ibadah. Sebuah kelompok penganut agama yang minoritas di suatu tempat biasanya selalu kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah. *Kedua*: penyiaran agama, yaitu dengan adanya isu-isu kristenisasi dan atau islamisasi. *Ketiga*: penodaan terhadap agama. Kasus ini dapat terjadi di semua agama oleh agama lain ataupun internal agama. Penodaan agama juga dapat terjadi antar agama, yakni dengan adanya tindakan, tulisan, ucapan dan sebagainya yang dianggap menghina, melecehkan dan menodai agama lain.
3. Program kerukunan hidup umat beragama yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, harus terus ditingkatkan dari kualitas dan kuantitasnya, khususnya pengadaaan tenaga penyuluh agama direspon positif oleh masyarakat. Dan terus menerus memperbaiki kekurangan-kekurangan dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal, untuk mencapai hasil optimal dan maksimal.
4. Program kerukunan umat beragama yang telah dijalankan harus diimbangi dengan program-program yang lain seperti pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan politik, dan program pencerahan masyarakat yang lain. Sebab akar permasalahan kerukunan tidak hanya murni faktor agama belaka, maka penyelesaiannya pun harus komprehensif, melibatkan semua unsur yang terlibat.

### Rekomendasi

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi pertimbangan terutama oleh pemerintah dalam mengatasi konflik keagamaan, oleh karena rekomendasi-rekomendasi hasil penelitian ini adalah:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama telah memperhatikan hasil positif, tapi memerlukan penajaman-penajaman program yang lebih fokus dan akurat. Perlunya menajamkan wawasan keagamaan dan kebangsaan masyarakat Jakarta yang multi etnis dan kultur, serta menyelesaikan aspek sosial politik dan budaya serta ekonomi yang masih memperlihatkan kesenjangan.
2. Program kerukunan harus dilaksanakan secara kontinyu, dan bukan secara instan yaitu ketika terjadi konflik antar umat beragama saja, sebab menyelesaikan secara instan tidaklah menyelesaikan masalah secara tuntas. Maka, keseriusan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap ketenteraman warga masyarakat benar-benar diperlukan.
3. Evaluasi terhadap program kerukunan yang telah dijalankan harus terus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program, kekurangan dan kelebihan, serta untuk mencari solusi terbaik, di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- "Kerusuhan di Jakarta: Enam Orang tewas". Dalam *Kompas No. 146 Tahun ke-34*, tanggal 23 Nopember 1998,
- A. Dahana. "Pembauran Lewat Inkorporasi". Dalam *Gatra. No. 33, Tahun IV*, tanggal 4 Juli 1998.
- Abdul Aziz, *Kerusuhan Sosial di Kecamatan Matraman (Studi Kasus di Palmeriem)*, oleh, Balitamas. Jakarta:2000,
- Adlin Sila Muhamad, *Orang Makasar di Bogor dan Jakarta (Studi Kasus tentang Hubungan Antar Etnik dan Paham Keagamaan)* oleh, Balitamas. Jakarta, 2000.
- Ali Ahmad Haidlor, *Kerusuhan Sosial di Matraman Jakarta (Studi Kasus Keter-*

---

*libatan Warga Kayumanis*), Jakarta: Balitamas, 2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua; Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Kanwil Depag Jatim, *Himpunan Keputusan Menteri Agama RI*, Surabaya” Kanwil Depag Jatim, 1994

Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. “SARA; Latar Belakang dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. *Makalah*. Disampaikan pada acara Seminar Nasional bertema ‘Konsep SARA dalam Tinjauan’. Surabaya: Kosmopolit, 1998,

R.M. Talib Puspokusumo, S.H., Ph.D. “Permasalahan Pribumi-Nonpribumi”. *Makalah*. Disampaikan pada acara Semi-

nar Nasional bertema ‘Konsep SARA dalam Tinjauan’. Surabaya: Kosmopolit, 1998

Safroedin Bahar dkk, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depag, 1977

Sudjangi, *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Proyek Kerukunan Hidup Umat Beragama, seri II & III, Jakarta: Depag, 1996

Talcott Parson, “Religion and the Problem of Meaning” dalam Roland Robertson (ed.) *Sociology of Religion*, (England: Penguin Middlesex, 1969)

Tragedi Ketapang. Dalam *Media Indonesia No. 6651 Tahun XXIX*, tanggal 24 Nopember 1998,